

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, Alumni, 1978
- Asikin Zainal, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Dreksi Atas Kepailitan Perseroan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003
- Hartono Sri Rejeki, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Bandung, Mandar Maju, 2002.
- Jono, *Hukum Kepailitan*, ed. I., cet. II., Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik*, ed. I., cet. I., Bandung, PT. Alumni, 2010.
- Marbun, Rocky, dkk., *Kamus Hukum Lengkap*, Jakarta, Visimedia, 2012.
- Marzuqi, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, 2005.
- Meliala, A. Qirom Syamsudin, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta, Liberty, 2010.
- Makarao, Moh. Taufik, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cetakan Pertama, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2004.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi keenam, Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta, Liberty, 2009
- Setiawan, R., *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Bina Cipta, 2007.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT Grafindo Media Pratama, 2010.
- Soerjono dan H Abdurrahman, *Metode penelitian suatu pemikiran dan penerapan*, Jakarta, Rineka Cipta, 1999.

_____, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, 2010.

Usman, Rachmadi, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2004.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573.

Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 02/Pailit/2011/ PN.Niaga.Smg

Putusan Pengadilan Negeri Semarang 12/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2018/PN.Smg

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 436 K/Pdt. Sus-Pailit/2019

C. Jurnal/ Artikel/ Tesis-Disertasi

Kurniawan, *Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas dalam Hukum Positif*, Jurnal, Mimbar Hukum, Vol. 26 No. 1, Mataram, 2014.

Octaviane, Dita, *Eksekusi Putusan Pailit Perseroan Terhadap Aset Pribadi Pemegang Saham*, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2015.

Pratama, Pandu Yudha, *Pemilihan dan Pengangkatan Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit pada Putusan Pailit di Pengadilan Negeri Semarang*, Tesis, Program Studi Magister Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2018.

Wiradharma, Ida Bagus Adi, *Perlindungan Hukum Terhadap Kurator dalam Melaksanakan Tugas Pengurusan dan Pemberesan Harta Debitur*, Journal Ilmu Hukum, 2018.

D. Internet

“Cakap”, KBBI daring, 2016, (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/cakap>), diakses pada 10 Februari 2023.